

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki ribuan pulau-pulau didalamnya yang saat ini sedang mengalami pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat agar memiliki kehidupan yang sejahtera, berkecukupan, adil dan makmur. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah cerminan dari perubahan aliran baru yang berpengaruh pada arus pendapatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal, regional dan nasional. Manfaat ini dapat diterima oleh masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kegiatan ekonomi baik di sektor formal maupun informal. Kegiatan ekonomi di sektor formal menjadi tujuan utama bagi para tenaga kerja untuk mencari pekerjaan yang layak, namun beberapa tahun belakang ini Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan sehingga jumlah pengangguran mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan ini disebabkan oleh rendahnya lapangan pekerjaan yang ada, tingkat pendidikan, kemiskinan, perkembangan teknologi, pemutusan hubungan kerja, persaingan global dan jumlah urbanisasi dari desa ke kota naik setiap tahun. Dimana banyak pendatang baru yang tidak mempunyai keahlian atau keterampilan khusus mencoba mencari peluang untuk bekerja di kota dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang selalu tinggi.

Kebutuhan hidup yang selalu tinggi akan membuat banyak orang berusaha untuk mencari pekerjaan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada di sektor informal. Hal ini yang membuat sektor informal banyak diminati oleh beberapa orang untuk mencari uang dengan memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Manfaat yang dapat diterima dari sektor informal adalah meningkatkan penghasilan masyarakat, menambah pendapatan daerah melalui retribusi daerah, menyediakan harga barang sesuai dengan jumlah uang, memudahkan pelanggan dalam membeli barang sesuai dengan keinginan, membuka lapangan pekerjaan baru, dan yang paling penting dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di kota. Hal inilah yang membuat sektor informal menjadi sasaran bagi beberapa orang yaitu PKL.

PKL adalah orang dengan modal relatif sedikit yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat (Novriansyah, 2018). Modal yang relatif sedikit ini digunakan untuk membeli barang dagangan dan peralatan yang dibutuhkan selama proses produksi berlangsung. Kegiatan usaha ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang selalu meningkat setiap harinya sehingga harus pandai dalam menentukan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan kepada PKL bahwa rendahnya penghasilan akan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup (Widyaningrum & Handoyo, 2014).

PKL sering memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia di ruang publik seperti pinggir jalan, trotoar, dan sekitar sungai. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan lalu lintas, kesehatan, kenyamanan, dan tingkat kebersihan kota berkurang. Sebaiknya pemerintah daerah mengelola usaha PKL agar tercipta kondisi yang lebih baik dengan cara pembimbingan. Penjelasan ini diperkuat dengan hasil penelitian bahwa bimbingan teknis berdagang melibatkan bagian Pemberdayaan PKL, akses perolehan sumber-sumber bahan baku melibatkan akademis perguruan tinggi, pemanfaatan permodalan melibatkan dunia perbankan dan pendampingan bagi para pedagang menggunakan paguyuban agar pola penyebaran PKL lebih merata (Suwandi & Sutrisno, 2018).

Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pekerjaan PKL itu sangat sederhana sehingga hanya beberapa orang yang berminat karena keterbatasan keahlian dan pendidikan. Padahal keberadaan PKL dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan dengan hasil bahwa keberadaan PKL sebenarnya memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya mampu berperan sebagai katup pengaman bagi ketenagakerjaan di Kota Surakarta saat terjadinya krisis ekonomi (Suwandi, 2012). Apabila pemerintah lebih memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat golongan ekonomi kebawah maka jumlah PKL tidak akan meningkat setiap tahun.

Jumlah PKL yang terus meningkat ini membuat pemerintah harus berupaya dalam mengatasinya agar kenaikan tidak terus terjadi dengan cara melakukan pemberdayaan PKL. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian bahwa cara mendorong pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui pendirian koperasi setiap sentral PKL, membantu peningkatan akses pasar dan pangsa pasar dengan cara menyelenggarakan acara yang melibatkan PKL, membantu peningkatan akses permodalan dan sumber-sumber permodalan dengan cara berkerjasama dengan Bank Solo dan Bank Jateng, membantu peningkatan akses teknologi tepat guna, membantu peningkatan akses kemitraan dengan supermarket terkait pembelian bahan baku PKL, membantu peningkatan manajemen dan organisasi kelompok, dan membantu peningkatan manajemen pengelolaan lokasi dengan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Satpol PP (Suwandi & Sutrisno, 2017).

Adanya pemberdayaan harus diimbangi dengan bimbingan yang sesuai dengan usaha PKL. Bimbingan ini dapat dilakukan untuk memperhatikan usaha yang dijalankan PKL agar usahanya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Usaha PKL dapat memberikan respon positif dan negatif terhadap perkembangan kota. Respon positif adanya PKL adalah dapat membaca peluang yang ada di sekitar lingkungan sedangkan respon negatifnya adalah tingginya tingkat penyebaran PKL di suatu kota.

Adanya bimbingan kepada PKL harus diikuti dengan pola penataan yang terus diusahakan pemerintah agar jumlah PKL yang ada tidak bertambah, akan tetapi kenyataannya jumlah PKL mengalami kenaikan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya tingkat pendapatan yang diperoleh selama berdagang. Tingkat pendapatan bersih adalah suatu pendapatan yang diperoleh PKL dengan cara menentukan jumlah pengeluaran untuk membeli barang dagangan dan penerimaan dari hasil berdagang. Tingkat pendapatan yang diperoleh sering kali berada ditaraf rendah sehingga PKL harus mampu memanfaatkan dan meminimalkan pendapatan yang diperoleh dengan memperhatikan jumlah kebutuhan.

Pendapatan yang diperoleh PKL tidak diikuti campur tangan pemerintah daerah sehingga besar kecilnya pendapatan dapat langsung diterima tanpa adanya potongan pajak daerah. Hal ini dikarenakan pendapatan PKL tidak mendapatkan dukungan modal dari pemerintah daerah sehingga modal yang digunakan sering kali berasal dari modal sendiri, sehingga besar kecilnya modal harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam membeli barang dagangan untuk diolah dan dijual. Padahal besarnya perolehan pendapatan PKL dapat digunakan untuk menambah pajak daerah, apabila pemerintah daerah ikut bekerjasama dalam meningkatkan usaha PKL dengan cara menyediakan fasilitas untuk berdagang dan keamanan saat berjualan.

Setiap kota memiliki jumlah PKL yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi daerah, wisata alam, perekonomian masyarakat sekitar, dan persebaran penduduk yang ada. Semakin tinggi perekonomian masyarakat di daerah tersebut maka penyebaran PKL akan semakin tinggi. Sedangkan semakin rendah perekonomian masyarakat di daerah tersebut maka penyebaran PKL akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan tingkat penyebaran PKL ditentukan oleh perekonomian masyarakat dan kondisi daerah yang cukup strategis agar pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang biaya hidup di perkotaan. Pola penyebaran PKL yang ada di Kota Surakarta lebih banyak berada di Kecamatan Kartasura.

Kecamatan Kartasura adalah sebuah tempat yang berada di Kabupaten Sukoharjo provinsi Jawa Tengah. Kartasura sering dikenal sebagai kota satelit bagi Surakarta dan menjadi tempat perkembangan perkotaan karena letaknya sangat bersimpangan dengan jalan raya lintas propinsi antara: Solo-Surabaya, Solo-Yogyakarta, dan Solo-Semarang. Hal ini dikarenakan Kartasura berada pada ketinggian 121 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 1.923 hektar dan jumlah penduduknya sekitar 120.000 jiwa. Kartasura memiliki 10 desa antara lain: Pucangan, Wirogunan, Kertonatan, Kartasura, Ngemplak, Ngabeyan, Ngadirejo, Singopuran, Pabelan, Makamhaji, Gonilan, dan Gumpang.

Banyak PKL yang ada di Kecamatan Kartasura tersebar di beberapa kelurahan yang ada di daerah tersebut. Hal ini akan disebabkan karena adanya persaingan yang terjadi antara PKL satu dengan yang lain guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil berdagang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa persaingan usaha antar PKL mulai meningkat, sehingga beberapa PKL berusaha lebih baik dan lebih menarik dari PKL lainnya, misalnya dengan cara memperbaiki teknik penyajian agar lebih menarik, memperbaiki fasilitas usaha, melakukan penataan tempat usaha, dan menggunakan tenda yang menarik (Suwandi, 2013). Adanya persaingan usaha ini membuat PKL harus berupaya untuk menarik konsumen atau pembeli agar tertarik dengan barang dagangan yang dijual misalnya: olahan makanan dan minuman yang tersedia bermacam-macam dengan rasa yang sangat enak dan harga yang cukup terjangkau. Banyaknya konsumen yang membeli akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh PKL selama berjualan di pinggir jalan raya. Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yaitu modal kerja dan pengalaman kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINGKAT PENDAPATAN BERSIH PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DITINJAU DARI MODAL KERJA DAN PENGALAMAN KERJA DI KECAMATAN KARTASURA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Akibat adanya krisis ekonomi membuat beberapa orang kehilangan mata pencaharian.
2. Kurangnya lapangan pekerjaan yang ada membuat banyak orang beralih usaha menjadi PKL.
3. Keberadaan PKL sering kali dipandang rendah oleh beberapa orang karena usahanya tidak didukung oleh pemerintah.
4. Banyaknya PKL menggunakan fasilitas umum yang tersedia di ruang publik tanpa adanya surat izin usaha.
5. Penyerbaran PKL mengalami kenaikan yang cukup tinggi terutama di Kecamatan Kartasura.
6. Adanya persaingan antar PKL satu dengan yang lain sehingga menyebabkan dampak perolehan pendapatan.
7. Rendahnya penghasilan yang diperoleh membuat PKL kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
8. Kurangnya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah kepada usaha PKL.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih memfokuskan masalah yang ada. Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan bersih adalah suatu tingkat pendapatan yang diperoleh PKL dengan cara menentukan jumlah aktivitas usaha dari penerimaan hasil perdagangan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai usaha tersebut. Tingkat pendapatan bersih dibatasi dengan hal: penerimaan dari aktivitas usaha yang telah dikurang dengan biaya dari aktivitas usaha.

2. Modal kerja adalah modal yang digunakan oleh PKL untuk membeli barang dagangan dengan cara memperhatikan jumlah uang yang tersedia. Modal kerja dibatasi dengan hal: kas, piutang, dan persediaan.
3. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan dengan baik dan lancar sesuai bidang keahliannya. Pengalaman kerja dibatasi dengan hal: lama kerja/masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan, dan penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh modal kerja terhadap tingkat pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura?
2. Adakah pengaruh pengalaman kerja terhadap tingkat pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura?
3. Adakah pengaruh modal kerja dan pengalaman kerja terhadap tingkat pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap tingkat pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap tingkat pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura.
3. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja dan pengalaman kerja terhadap tingkat pendapatan bersih PKL di Kecamatan Kartasura.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya pada perdagangan dan pendapatan yang diperoleh PKL.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang akan melanjutkan penelitian.

#### b. Bagi PKL

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan tingkat pendapatan bersih PKL agar dapat mengembangkan usahanya lebih maju dan berkembang.

#### c. Bagi Pemerintah Kecamatan Kartasura

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah agar dapat memperhatikan usaha yang dijalankan oleh PKL.